

SINERGI LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN/BUMN DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA SAMARINDA

Nafizah Hayati¹

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang sinergi yang dihasilkan melalui tugas masing-masing lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber Purposive Sampling untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui saling bekerjasama, saling mendukung, dan saling berkoordinasi terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda. Data-data kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN telah bersinergi dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda yang dapat dilihat melalui indikator saling bekerjasama antara Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui rapat pertemuan serta tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan bagi penerima bantuan atau peserta PKH, terjalin situasi saling mendukung antara UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dan PT. Pos Indonesia dengan saling membantu saat penyaluran bantuan berlangsung di lapangan sesuai tugas masing-masing, serta adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga terciptanya pengawasan yang baik antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda.

Kata Kunci : *sinergi, penyaluran bantuan, program keluarga harapan (PKH), lembaga pemerintahan, BUMN.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nafizah.hayati@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial peran serta masyarakat yang secara aktif dalam pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sosial di berbagai negara. Dalam UU No. 40/2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dikatakan bahwa SJSN adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin, agar setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, SJSN, merupakan program pemerintah dan masyarakat. SJSN merupakan program negara (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pendekatan sistem, dan SJSN ada dua bentuk yaitu, peserta yang ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik sosial/komersial atau tabungan bagi tenaga kerja formal serta peserta yang disubsidi negara dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

Salah satu usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya bagi keluarga kurang mampu atau miskin yaitu dengan mengeluarkan program yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk dari kebijakan dibidang perlindungan sosial yang merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan evaluasi penyaluran bantuan PKH tahap pertama lalu masih terdapat beberapa hambatan dalam proses penyaluran bantuan. Berdasarkan masalah tersebut diperlukan sinergi atau pentingnya sinergi dalam mengatasi masalah tersebut agar terjalin sikap saling mendukung dan mengisi kekurangan antara pihak satu dan lainnya, melalui sinergi pula kita dapat mengusahakan hasil yang optimal terhadap suatu tujuan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya PKH (Program Keluarga Harapan).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Samarinda.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sinergi lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergi lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Sinergi Lembaga Pemerintahan/BUMN

Sebelum membahas tentang sinergi lembaga pemerintahan/BUMN terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian sinergi. Menurut Surayin dalam kamus umum bahasa Indonesia (2011), dijelaskan bahwa sinergi adalah kerjasama antara orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih besar daripada jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja sendiri.

Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya *7 Habits of Highly Effective People* (2004: 259), sinergi (*Synergy*) adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota tim.

Dalam bersinergi, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Menurut Moekijat dalam bukunya koordinasi (suatu tinjauan teoritis) (2002 : 2) koordinasi merupakan penyesuaian secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pada beberapa definisi yang menjelaskan mengenai sinergi, maka ditarik kesimpulan bahwa sinergi ialah suatu kegiatan atau kondisi kerjasama dimana antara satu pihak dengan pihak lainnya saling mendukung dan berkoordinasi untuk mensukseskan suatu kebijakan sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Sinergi merupakan suatu situasi dimana adanya penyatuan atau kekompakan perilaku, adanya kegiatan gabungan atau kolaborasi/ interaksi antara satu unsur/ elemen dengan unsur/ elemen lainnya dalam menghasilkan efek yang lebih besar daripada individual.

Sebagaimana telah penulis bahas di atas tentang pengertian sinergi, selanjutnya penulis membahas tentang lembaga pemerintahan dan BUMN. Sebelum membahas Lembaga Pemerintahan, terlebih dahulu penulis membahas sedikit tentang Lembaga Negara. Lembaga Negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi (2007:167) dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat Tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 (delapan) lembaga negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima konstitusional dari Undang-Undang Dasar. Kedelapan lembaga negara tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial.

Salah satu lembaga negara yang berwenang melaksanakan Undang-Undang dalam sistem pemerintahan adalah Presiden dan Wakil Presiden. Presiden

adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. salah satu Kementerian yang mengurus urusan di bidang pemerintah dalam negeri adalah Kementerian Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri di bantu oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah di bantu perangkat daerah yaitu Dinas Daerah. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada salah satu Dinas Daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang sosial yaitu Dinas Kesejahteraan Sosial. Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan ataupun suatu program pemerintah, lembaga pemerintahan seringkali bekerja sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Riant Nugroho dan Ricky Siahaan dalam bukunya BUMN Indonesia, BUMN masih merupakan bangun usaha yang dapat kita harapkan sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi mengingat bangun usaha Menteri Badan Usaha Milik Negara lainnya masih belum pulih sepenuhnya dari tekanan krisis ekonomi yang kita hadapi semenjak beberapa tahun yang lampau.

Salah satu BUMN yang bekerja sama dengan Lembaga Pemerintahan adalah PT.Pos Indonesia sebagai manajemen sistem pembayaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menjelaskan bahwa Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Sinergi lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN adalah suatu bentuk kerja sama antara lembaga pemerintahan dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebelum membahas tentang penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), terlebih dahulu penulis akan membahas tentang pengertian penyaluran bantuan. Menurut LH. Santoso dalam bukunya Kamus Modern Bahasa Indonesia (2004), dijelaskan bahwa penyaluran berasal dari kata “salur” yang berarti saluran, menyalurkan, mengalirkan, dan menyampaikan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran berarti menyampaikan atau suatu cara yang dipakai dalam suatu kegiatan untuk memberikan hasil yang baik dan maksimal. Sedangkan menurut LH. Santoso dalam bukunya Kamus Modern Bahasa Indonesia (2004), menjelaskan bahwa bantuan berasal dari kata “bantu” yang berarti menolong. Dapat didefinisikan bahwa bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu atau menolong.

Sebagaimana telah penulis bahas di atas tentang pengertian penyaluran bantuan, selanjutnya penulis akan membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Dalam pengertian, Program Keluarga Harapan (PKH) jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian penyaluran bantuan dan Program Keluarga Harapan (PKH), maka penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah proses pendataan, survey, dan pencairan dana atau penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke masyarakat agar dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diterima oleh penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sehingga dana bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.

Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagaimana disampaikan di depan, bahwa sinergi merupakan sebuah kerjasama proses dimana interaksi dari dua atau lebih orang atau organisasi akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Lembaga pemerintahan/BUMN yang bersinergi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kota adalah Dinas Kesejahteraan Sosial dan PT. Pos Indonesia. Telah dijelaskan pula bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu proses dari

awal sampai bantuan tersebut di terima penerima bantuan. Maka di simpulkan bahwa indikator dari sinergi lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda, yaitu kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), saling mendukung antara UPPKH dan PT. Pos Indonesia dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan koordinasi antara Dinas Kesejahteraan Sosial dengan UPPKH dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah saling bekerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), saling mendukung antara UPPKH dan PT. Pos Indonesia dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan saling berkoordinasi antara Dinas Kesejahteraan Sosial dengan UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Moleong (2000:6) mengatakan, “ deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka”.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saling Bekerjasama antara Lembaga-Lembaga Pemerintahan dalam Proses Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Samarinda

Sinergi lembaga-lembaga pemerintahan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terjadi melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing kementerian dan lembaga (k/l) sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing kementerian dan lembaga sebelum penyaluran bantuan dilakukan. Adapun kerjasama lembaga-lembaga pemerintahan dalam proses penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda meliputi rapat pertemuan dan verifikasi data.

Lembaga-lembaga terkait telah bersinergi dalam bekerja sama mengadakan rapat pertemuan setiap 6 bulan atau setahun sekali untuk mengetahui dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyaluran bantuan sehingga tidak terjadi dalam proses penyaluran bantuan selanjutnya dan menyinkronkan segala sesuatunya dalam hal persiapan program seperti legalitas PKH Kota Samarinda melalui surat keputusan Walikota dan sebagainya. Serta kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mengenai program PKH yang pada dasarnya program bantuan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Pada bidang pendidikan, UPPKH yang dibantu pendamping PKH di bawah naungan Dinas Kesejahteraan Sosial telah bersinergi dalam bekerjasama dengan

Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam memverifikasi data siswa penerima bantuan PKH setiap sebulan sekali. Dengan menugaskan UPTD-UPTD Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di sekolah tempat anak peserta PKH menempuh pendidikan. Sedangkan pada bidang kesehatan, UPPKH yang berada di bawah Dinas Kesejahteraan Sosial telah bersinergi dalam bekerjasama dengan Dinas Kesehatan membantu proses verifikasi data dalam bidang kesehatan dengan menugaskan petugas pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas dan didistribusikan oleh pendamping PKH. Data yang telah terverifikasi tersebut bisa dipergunakan dalam penyaluran bantuan ditahap selanjutnya.

Sinergi dalam bentuk kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda bisa diringkas dalam tabel di bawah ini

Tabel 1
Bentuk Kerjasama antara Lembaga-lembaga Pemerintahan

No	Bentuk Kerjasama	Hasil Dalam Bentuk Laporan	Pihak-Pihak yang Bekerjasama	Output
1.	Rapat pertemuan kejasama menyinkronkan dalam hal persiapan program	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RTSM atau Peserta PKH dari tahun 2012 sampai tahun 2014. - Nama operator dan pendamping PKH Kota Samarinda. - Legalitas PKH di Kota Samarinda melalui surat keputusan Walikota Samarinda Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PKH di Kota Samarinda. - Legalitas PKH di Kota Samarinda melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Tentang Pembentukan Tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kota Samarinda - Dinas Kesehatan Kota Samarinda - Kementerian Agama (kanwi) - Badan Pusat Statistik Kota Samarinda - Dinas kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Samarinda - Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda - Bappeda Kota Samarinda - PT. Pos Indonesia Kota Samarinda 	Kegiatan Terlaksana

2.	Verifikasi Data	Sekretariat UPPKH di Kota Samarinda. - Alokasi dana sharing APBD Kota Samarinda peruntukan dana untuk memfasilitasi kegiatan dan penyaluran bantuan PKH Kota Samarinda. - Laporan anggaran dari operasional PKH Kota Samarinda. - Laporan Perubahan Jumlah RTSM	- Kecamatan Samarinda Seberang - Kecamatan Samarinda Ulu - Kecamatan Samarinda Ilir - Kecamatan Samarinda Utara - Kecamatan Palaran - Kecamatan Sambutan - Kecamatan Sungai Pinang - Dinas Pendidikan Kota Samarinda - Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Data Terverifikasi Tersedia
----	-----------------	--	---	-----------------------------

Sumber : Laporan UPPKH Kota Samarinda Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan terkait telah bersinergi dalam bekerjasama mengadakan rapat pertemuan. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda memberikan laporan-laporan mengenai perkembangan PKH di Kota Samarinda, UPPKH yang berada dibawah naungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda di bantu oleh pendamping PKH yang tergabung dalam tim UPPKH Kota Samarinda bekerja sama dengan UPTD-UPTD Dinas Pendidikan dalam memverifikasi data anak peserta PKH serta Dinas Kesehatan membantu UPPKH dalam memverifikasi data peserta PKH di bidang kesehatan.

Saling Mendukung antara Unit Pengendali Program Keluarga Harapan (UPPKH) dan PT. Pos Indonesia dalam Proses Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Samarinda

Saling mendukung antara Unit Pengendali Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Samarinda dengan PT. Pos Indonesia Kota Samarinda dapat mewujudkan suatu keseragaman atau kesepakatan kerja, serta dapat terjalin upaya atau program kegiatan yang tujuannya berusaha untuk saling mengisi kekurangan dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Samarinda. Adapun saling mendukung antara UPPKH dan PT. Pos Indonesia

dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda meliputi persiapan awal dan dukungan pada saat penyaluran bantuan dilapangan.

Pada persiapan awal, UPPKH dan PT. Pos Indonesia saling mendukung satu sama lain dalam hal pencetakan dan pendistribusian formulir calon peserta PKH yang mana formulir tersebut akan divalidasi UPPKH Kota Samarinda dan pendamping PKH mendata ulang atau melakukan survey calon peserta PKH secara langsung dari pintu ke pintu. Setelah kunjungan RTSM selesai dilaksanakan dan telah terpilih peserta-peserta atau penerima bantuan PKH, PT. Pos mencetak undangan pertemuan awal (PA). Hasil cetakan undangan pertemuan awal (PA) dan formulir validasi diserahkan PT. Pos Pusat ke operator UPPKH Kota Samarinda. PT. Pos hanya mencetak undangan pertemuan awal, sedangkan untuk formulir validasi telah menggunakan metode validasi online, yang mana penyusunan jadwal dan pada saat pertemuan awal (PA) dan validasi diatur oleh UPPKH Kota Samarinda. Setelah pertemuan awal dilakukan, seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan merupakan daftar resmi peserta PKH yang kemudian dikirim ke PT. Pos untuk mencetak kartu peserta PKH dan menjadi bukti kepesertaan dalam PKH sebelum pembayaran pertama dilakukan. Selain pencetakan dan distribusi formulir, saling mendukung antara UPPKH dan PT. Pos Indonesia juga terjadi dalam penyusunan jadwal penyaluran/pencairan dana bantuan.

Selain pencetakan dan distribusi formulir serta penyusunan jadwal, proses saling mendukung antara UPPKH Kota Samarinda dan PT. Pos Indonesia Kota Samarinda juga mencakup proses pencairan/penyaluran bantuan PKH ke RTSM/peserta PKH. Pihak UPPKH mendata peserta PKH yang hadir dalam proses pencairan/penyaluran bantuan dan membagikan slip yang kemudian slip tersebut akan disetor ke pihak PT. Pos Indonesia sebagai bukti bahwa bantuan telah diberikan/tersalurkan ke peserta PKH. Adapun tabel di bawah ini menunjukkan jumlah bantuan PKH yang diterima RTSM/peserta PKH dalam proses saling mendukung antara UPPKH dan PT. Pos Indonesia yaitu penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda.

Tabel 2
Jumlah Bantuan PKH (Per RTSM)

Bentuk Bantuan	Jumlah Bantuan (Per Tahap)	Jumlah Bantuan (Per Tahun)
Bantuan tetap	Rp. 50.000	Rp. 200.000
Bantuan bagi RSTM yang memiliki : Anak usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui	Rp. 200.000	Rp. 800.000
Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp. 100.000	Rp. 400.000
Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	Rp. 200.000	Rp. 800.000
Bantuan maksimum per RSTM	Rp. 550.000	Rp. 2.200.000

Bantuan minimum per RSTM	Rp. 150.000	Rp. 600.000
Rata-rata bantuan per RSTM	Rp. 347.000	Rp. 1.390.000

Sumber : Pedoman Umum PKH Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah bantuan PKH berbeda tiap kategori dan disertai pula jumlah bantuan minimum yaitu Rp.600.000 per tahun dan maksimum yaitu Rp.2.200.000 yang diterima peserta PKH.

Laporan hasil saling mendukung antara UPPKH Kota Samarinda dan PT.Pos Indonesia Kota Samarinda dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda berlangsung dengan lancar dan bantuan tersalurkan. Adapun jumlah bantuan PKH yang tersalurkan dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3
Jumlah Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah RTSM	Total Pengurangan	Alokasi Dana
Palaran	451	Rp -	Rp 273,365,000
Samarinda Ilir	257	Rp -	Rp 165,305,000
Samarinda Seberang	333	Rp -	Rp 198,670,000
Samarinda Ulu	261	Rp -	Rp 164,140,000
Samarinda Utara	660	Rp -	Rp 395,025,000
Sambutan	297	Rp 7,674,500	Rp 154,480,500
Sungai Pinang	259	Rp -	Rp 159,535,000
Total	2518	Rp 7,674,500	Rp 1,510,520,500

Sumber : Laporan UPPKH Kota Samarinda Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH tahap 2 tahun 2014 berbeda tiap kecamatan yang menjadi wilayah PKH di Kota Samarinda. Total bantuan yang tersalurkan sebanyak Rp. 1.510.520.500, wilayah yang paling banyak mendapat bantuan adalah Kecamatan Samarinda Utara yaitu senilai Rp. 395.025.000 dan wilayah yang paling sedikit mendapat bantuan adalah Kecamatan Sambutan yaitu senilai Rp. 154.480.500.

Sedangkan jumlah bantuan PKH tahap 3 tahun 2014 yang telah tersalurkan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Jumlah Bantuan PKH Tahap 3 Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah RTSM	Total Pengurangan	Alokasi Dana
Palaran	451	Rp -	Rp 156,625,000
Samarinda Ilir	257	Rp -	Rp 103,500,000

Samarinda Seberang	332	Rp	-	Rp 199,250,000
Samarinda Ulu	261	Rp	-	Rp 101,500,000
Samarinda Utara	656	Rp	-	Rp 235,750,000
Sambutan	298	Rp	-	Rp 91,250,000
Sungai Pinang	259	Rp	-	Rp 97,375,000
Total	2514	Rp	-	Rp 914,250,000

Sumber : Laporan UPPKH Kota Samarinda Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah bantuan PKH yang tersalurkan pada tahap 3 tahun 2014 mengalami pengurangan dari jumlah bantuan tahap sebelumnya yaitu sebanyak Rp. 914.250.000. Wilayah yang paling banyak mendapat bantuan adalah Kecamatan Samarinda Utara yaitu senilai Rp. 235.750.000 dan wilayah yang paling sedikit mendapat bantuan adalah Kecamatan Sambutan yaitu senilai Rp. 91.250.000.

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah bantuan yang tersalurkan selalu mengalami perubahan di setiap tahapnya sesuai hasil verifikasi data peserta PKH setiap bulannya.

Sinergi dalam bentuk saling mendukung antara UPPKH dan PT.Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda bisa diringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Bentuk Dukungan UPPKH dan PT. Pos Indonesia Kota Samarinda

No	Bentuk Dukungan	Bentuk Kegiatan	Pihak Yang Saling Mendukung	Output/Hasil
1.	Mendukung Persiapan Awal	<ul style="list-style-type: none"> - Pencetakan dan pendistribusian formulir - Mengatur penyusunan jadwal penyaluran atau pencairan bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial - PT. Pos Indonesia pusat - UPPKH Kota Samarinda - PT.Pos Indonesia Kota Samarinda 	Formulir Terdistribusi dan Penyaluran Bantuan Terjadwal
2.	Dukungan Pada Saat Penyaluran Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyaluran atau pencairan bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - UPPKH Kota Samarinda - PT.Pos Indonesia Kota Samarinda 	Bantuan Tersalurkan

Sumber : Laporan UPPKH Kota Samarinda Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa UPPKH dan PT.Pos Indonesia telah saling mendukung dan bersinergi dalam persiapan awal yang mencakup

pencetakan dan pendistribusian formulir serta mengatur penyusunan jadwal penyaluran atau pencairan bantuan serta saling mendukung dalam proses penyaluran bantuan dilapangan.

Saling Berkoordinasi Antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dalam Proses Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Samarinda

Saling berkoordinasi antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH dalam proses penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda karena merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Koordinasi dapat dipandang sebagai salah satu bagian perekat, penyelarar, atau pemaduan pelaksanaan kerja dari masing-masing unit kerja sehingga menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak dan terarah kepada suatu tujuan serta target yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam penyaluran bantuan PKH koordinasi yang terjadi antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH Kota Samarinda hanya sebatas laporan dan pengawasan saja. UPPKH selalu melaporkan segala bentuk kegiatan PKH yang terjadi di lapangan dan Dinas Kesejahteraan Sosial mengawasi setiap bentuk kegiatan tersebut.

Sinergi dalam bentuk saling berkoordinasi antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda bisa diringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Bentuk Koordinasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH Kota Samarinda

No	Bentuk Koordinasi	Bentuk Kegiatan	Pihak Yang Berkoordinasi	Output/Hasil
1.	Pertemuan	Penyampaian Laporan Yang Di Lakukan Pihak UPPKH Kota Samarinda Kepada Pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda	Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan UPPKH Kota Samarinda	Laporan Tersedia
2.	Koordinasi Dalam Hal Pengawasan	Mengkoordinir Kegiatan Penyaluran Bantuan Termasuk Mengawasi Dilapangan Yang Dilakukan Pihak	Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan UPPKH Kota Samarinda	Kegiatan Terlaksana

		Dinas Kesejahteraan Sosial		
--	--	----------------------------	--	--

Sumber : Laporan UPPKH Kota Samarinda Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH berkoordinasi dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda telah terlaksana secara sinergis tanpa ada kendala.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinergi lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda dilihat dari tiga indikator yaitu kerjasama, saling mendukung, dan koordinasi. Berkenaan dengan saling bekerjasama lembaga-lembaga Pemerintahan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah saling bersinergi. Kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan sudah berjalan secara sinergis dalam mengadakan rapat pertemuan menyinkronkan dalam hal persiapan program penyaluran bantuan setiap 6 bulan atau setahun sekali dan verifikasi data. sehingga proses penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda dapat terlaksana secara berkesinambungan. Kerjasama antar lembaga-lembaga pemerintahan sudah terlaksana dengan baik walaupun belum kondusifnya jadwal pertemuan pada saat mengadakan rapat pertemuan.
2. Dalam hal saling mendukung, UPPKH Kota Samarinda dan PT. Pos Indonesia sudah bersinergi dengan saling mendukung dalam penyaluran bantuan pada kegiatan Pencetakan dan pendistribusian formulirserta mengatur penyusunan jadwal penyaluran atau pencairan bantuan dan dukungan dalam proses penyaluran atau pencairan bantuan di lapangan. Kegiatan saling mendukung antara UPPKH dan PT.Pos Indonesia sudah berjalan lancar, hanya saja waktu penyaluran bantuan yang tidak tetap waktunya setiap tahap karena menunggu dana dari Kementerian Sosial.
3. Sehubungan dengan koordinasi, Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH Kota Samarinda sudah berkoordinasi dengan mengadakan pertemuan dalam penyampaian laporan pihak UPPKH Kota Samarinda kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda penyaluran bantuan di Kota Samarinda. Dinas Kesejahteraan Sosial selalu mengawasi setiap kegiatan UPPKH dalam penyaluran bantuan PKH dan UPPKH selalu memberikan laporan tersebut dan disetujui oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, sehingga terciptanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesejahteraan Sosial Dan UPPKH Kota Samarinda dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda. Koordinasi yang terjadi antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH dalam penyaluran bantuan PKH di Kota Samarinda berjalan dengan lancar dan baik

tanpa kendala apapun. Walaupun masih banyak kegiatan-kegiatan yang semestinya dilakukan selain melaporkan segala kegiatan dan mengawasi setiap kegiatan penyaluran bantuan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Oleh karena kerjasama lembaga-lembaga pemerintahan yang berupa rapat pertemuan hanya dilakukan 6 bulan atau setahun sekali saja, maka frekuensi rapat pertemuan harus ditingkatkan agar terciptanya kerjasama yang kondusif dan maksimal antar lembaga-lembaga pemerintahan terkait.
2. Oleh karena saling mendukung antara UPPKH dan PT.Pos Indonesia yang berupa persiapan awal dan kegiatan penyaluran bantuan dilapangan yang tidak tetap jadwalnya yang dikarenakan dana dari pusat (Kementerian Sosial) belum tersalurkan ke daerah, maka sebaiknya pemerintah daerah membantu seperti menggunakan APBD terlebih dahulu dalam menyalurkan bantuan agar kegiatan penyaluran bantuan tersalurkan sesuai jadwal.
3. Oleh karena kegiatan koordinasi terfokus pada pertemuan penyampaian laporan dan pengawasan saja, maka kegiatan koordinasi perlu diperluas misalnya koodinasi dalam pelaksanaan program, kegiatan penyelesaian masalah dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Covey, Stephen. 2004. *The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15)*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Daft, Richard. 2002. *Manajemen, Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Drs.Moekijat. 2002. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Kencana Sayafie, Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant dan Ricky Siahaan. 2005. *BUMN Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, L.H. 2004. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supriady Bratakusumah, Deddy dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen-dokumen :

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 *Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 *Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara*

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2008 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 *Tentang BUMN*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 *Tentang Pos*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 *Tentang Kementerian Sosial*

Sumber Internet :

Admin."9-12 April, Bimtek Pendamping-operator PKH di Samarinda".(<http://dinsos.kaltimprov.go.id/berita-358-912-april-bimtek-pendampingoperator-pkh-di-samarinda.html>, di akses 28 Februari 2014).

Admin. "Definisi pelayanan". http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_public, di akses 13 Agustus 2014).

Admin."Dinsos Kaltim Susun Data Akurat Rumah Tangga Sangat Miskin".(<http://vivaborneo.com/dinsos-kaltim-susun-data-akurat-rumah-tangga-sangat-miskin.htm>, di akses 24 November 2013).

Admin."Hebatnya Sinergi Membentuk Kerja Sama Kreatif dalam Organisasi Bisnis Anda".(ikhtisar.com/sinergi-sebagai-bentuk-kerja-sama-kreatif/, di akses 09 Desember 2013).

Admin."Mari Mengetahui Program PKH".(<http://kemsos.go.id/modules.php?Name=News&file=Print&sid=404>, di akses 29 Januari 2014).

Admin."Sekilas Program PKH di Samarinda".(<http://disbudparkom.blogspot.com/2012/11/sekilas-program-keluarga-harapan-pkh-i.html>, di akses 28 Februari 2014).